

## Kick-Off Program Perlindungan Saksi dan Korban

**YOGYA (KR)** - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mulai memperkenalkan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah sasaran awal digelar kick-off program yang akan merekrut para relawan dalam sebuah komunitas bernama, Sahabat Saksi dan Korban.

Acara kick-off Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas wilayah DIY digelar di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (2/6), dihadiri Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu yang memperkenalkan program ke publik.

Sebagai bentuk dukungan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas wilayah DIY, hadir Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (Dapil DIY) Drs HM Idham Samawi dan perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Karo Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristianto. Turut hadir Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, upaya LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Indonesia mengalami dinamika serta tantangan yang beragam. Semakin dikenalnya LPSK oleh publik telah menuntut kesiapan LPSK untuk menjangkau permohonan perlindungan yang masuk dari Sabang hingga Merauke.

Selain itu, kata Hasto, kondisi rentang geografis Indonesia yang sangat luas serta terbatasnya sumber daya manusia di LPSK, juga merupakan salah satu tantangan yang harus dicari solusi. "Salah satu ikhtiar LPSK untuk menjawab dan mengatasi problematika yang muncul adalah dengan menginisiasi lahirnya sebuah program yang berlandaskan nafas kerja kolaboratif antar berbagai pihak," ujar Hasto.

LPSK, lanjut dia, sangat menyadari bahwa kerja-kerja perlindungan saksi dan korban membutuhkan dukungan dari civil society. Konsepsi kerja kolaboratif inilah yang kemudian diwujudkan melalui Program Perlindungan Saksi

dan Korban Berbasis Komunitas.

Idham Samawi menyambut baik mulai disosialisasikannya Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Menurutnya, melindungi segenap warga negara adalah tugas dari negara, khusus untuk LPSK adalah melindungi saksi dan korban. Dengan adanya program ini maka, Idham meyakini saksi dan korban akan benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana. "Perlindungan saksi dan korban ini sangat penting, sehingga LPSK harus punya perwakilan di 34 provinsi di Indonesia," katanya.

Sosialisasi Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas wilayah DIY dilaksanakan selama tiga hari, 2-4 Juni 2022, dengan target audience terpisah. Hari pertama peserta sosialisasi merupakan mitra kerja LPSK yang selama ini telah bekerja memberikan layanan bagi saksi dan korban.

Kemudian pada hari kedua, bertajuk galang solidaritas program perlindungan



KR-Devid Permama

Kick-off Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di wilayah DIY.

saksi dan korban berbasis komunitas, peserta disasarkan lebih kepada organisasi/kelompok masyarakat sipil dan juga kalangan akademisi yang memiliki kepedulian dan bekerja membantu para saksi dan korban kejahatan untuk mengakses keadilan.

Acara hari ketiga, dibalut sarasehan budaya menyasar komunitas yang ada di wilayah Yogyakarta, pelaku seni, insan media dan para penyintas tangguh yang mampu bangkit dari keterpurukan setelah kejadian tidak mengenakkan yang pernah mereka alami. (Dev)-f

## KUNJUNGAN BBPOM DAN BPKN RI Pasar Prawirotaman Menuju Pasar Sehat



KR-Juvintarto

Kepala BBPOM Yogya melakukan pengujian sampling makanan di mobil keliling yang parkir depan Pasar Prawirotaman.

**YOGYA (KR)** - Fasilitas Pasar Prawirotaman, Mergangan Kota Yogyakarta dinilai bagus dan terintegrasi antara lantai I - IV. Setiap lantai punya spesifikasi yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari menuju Pasar Sehat.

"Dari Pasar Tradisional kini menjadi Pasar Semi Modern, cukup bersih dan bisa menjadi role model, tidak ada temuan bahan makanan berbahaya, sampling yang ada bisa dilakukan pengujian," tutur Kepala Balai Besar POM (BBPOM) Yogyakarta Trikoranti Mustikawati Apt, Kamis (2/6) kepada wartawan di sela kunjungan lapangan di Pasar Prawirotaman.

Kunjungan dalam rangka Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI dan BPOM dalam perlindungan konsumen. "Sesuai amanat UU RI Nomor 18/2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pa-

ngan di setiap rantai pangan secara terpadu," ungkap Trikoranti.

Turut mendampingi dari BPKN RI Renti Mahairini dan Heru Sutadi bersama dengan Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti, beberapa mahasiswa magang sebagai Penggerak Muda Pasar Rakyat, juga Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Untung. "Ada ruang podcast, meeting dengan akses mudah antar lantai, ramah difabel, juga barcode yang memudahkan," tambah Renti.

Dalam peninjauan tersebut juga dijumpai los untuk penjualan daging sapi tutup. "Sudah beberapa hari tutup sebagai solidaritas untuk cegah kontaminasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan sudah diinformasikan sejak Selasa (31/5). Sementara kebutuhan daging sapi bisa dipenuhi di pasar modern, harapannya 3 hari tutup maka Jumat (3/6) sudah buka lagi," ucap Sri Riswanti. (Vin)-f

## PPDB SMP NEGERI DIMULAI 10 JUNI

# Kuota Zonasi Wilayah Berkurang Jadi 15 Persen

**YOGYA (KR)** - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP negeri di Kota Yogya tahun ajaran 2022/2023 akan dimulai 10 Juni mendatang. Kuota zonasi wilayah mengalami pengurangan menjadi 15 persen dari sebelumnya 20 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan kuota tersebut bukan berdasarkan daya tampung tiap sekolah melainkan dihitung dari kuota siswa baru yang diterima tahun ini. "Untuk zonasi wilayah kuotanya menjadi 15 persen. Jumlah kursi yang akan disediakan di tiap SMP negeri juga akan berbeda-beda," jelasnya, Kamis (2/6).

Kuota zonasi wilayah yang mengalami pengurangan dari tahun lalu, selanjutnya akan ditambahkan untuk kuota zonasi mutu menjadi 44 persen. Selanjutnya untuk kuota

bitbit unggul 10 persen dan prestasi luar kota 10 persen. Selain itu jalur afirmasi masyarakat ekonomi tidak mampu pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dengan kuota 11 persen, afirmasi disabilitas lima persen dan mutasi orangtua lima persen.

Budi menjelaskan, pengurangan kuota untuk zonasi wilayah tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi PPDB pada tahun sebelumnya. Terutama jumlah sekolah di Yogya sisi selatan lebih sedikit dibandingkan sisi utara. Dari total 16 SMP negeri di Kota Yogya, lokasinya yang berada di sisi selatan hanya lima

sekolah dan sisanya yakni 11 sekolah berada di sisi utara. "Pada tahun ini jumlah kursi untuk zonasi wilayah bagi SMP di bagian selatan akan ditingkatkan dan untuk di bagian utara akan diperkecil. Harapannya mampu meningkatkan akses untuk siswa yang bertepatan tinggal di Yogya bagian selatan," imbuhnya.

PPDB zonasi wilayah tersebut ditunjukkan untuk siswa yang berasal dari Kota Yogya yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Seleksi sepenuhnya hanya akan didasarkan pada jarak rumah ke sekolah yang dihitung dari titik tengah RW tempat tinggal ke sekolah. Dengan kebijakan tersebut pihaknya berharap jarak rumah paling jauh dari siswa yang diterima di SMP di bagian utara dan selatan tidak akan terlalu berbeda.

PPDB zonasi wilayah seluruh-

nya akan dilakukan secara daring melalui laman [yogya.siappdb.com](http://yogya.siappdb.com). Calon siswa bisa mengajukan pendaftaran mulai 10-15 Juni dengan memilih tiga SMP. Selanjutnya, melakukan verifikasi pendaftaran di salah satu SMP pilihan pada 13-15 Juni dengan membawa kelengkapan syarat pendaftaran yaitu hasil cetak pengajuan pendaftaran, surat keterangan hasil Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD), dan fotokopi kartu keluarga.

Total daya tampung SMP negeri di Kota Yogya tercatat sebanyak 3.466 kursi. Sedangkan lulusan SD di Kota Yogya pada tahun ini sebanyak 6.998 orang. Meski demikian masyarakat tidak perlu khawatir karena total daya tampung SMP/MTs baik negeri maupun swasta di Kota Yogya mencapai sekitar 9.000 kursi. (Dhi)-f

## Pajak Hal Sensitif bagi Masyarakat

**YOGYA (KR)** - Edukasi dalam hal apapun merupakan investasi intelektual yang 'long lasting' dan menjamin kemajuan masyarakat. Investasi intelektual tersebut tidak hanya dalam bidang pajak, namun masyarakat yang teredukasi dengan baik pada segala aspek juga menjadi impian bersama.

"Saya berharap Kanwil Pajak bisa proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tingkat kesadaran taat pajak meningkat. Melalui kesadaran yang terbangun, tidak akan ada rasa berat bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya," kata Wagub DIY Sri Paku Alam X saat menerima audiensi Plt Kepala Kanwil DJP DIY Slamet Sutantyo, di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (2/6).

Wagub DIY mengungkapkan, pajak adalah hal sensitif bagi masyarakat tapi sangat krusial. Ketepatan dan ketaatan dalam berpajak, akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Mengingat, pajak yang dibayarkan akan kembali dinikmati masyarakat dalam bentuk yang lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan bencana, dan yang lainnya.

"Saya *ndherek* titip warga DIY dalam hal perpajakan. Terima kasih kantor pajak banyak membantu kami, dan ke depan saya dan jajaran akan terus berkoordinasi dengan DJP untuk membangun masyarakat kami lebih baik dan lebih teredukasi," ungkap Wagub DIY.

Menanggapi hal tersebut, Slamet Sutantyo mengatakan siap melaksanakan arahan Wagub DIY terutama untuk bekerjasama mengedukasi masyarakat. Slamet yang saat ini juga mengampu tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 2 di Solo ini mengatakan siap untuk mengedukasi masyarakat DIY. (Ria)-f

## 885 WIFI PUBLIK TERSEBAR DI 502 RW

# Sekda Dorong Penguatan Ekosistem Digital

**YOGYA (KR)** - Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya mendorong adanya penguatan ekosistem digital berbasis wilayah. Hal ini seiring sudah meluasnya jaringan internet atau wifi publik yang difasilitasi pemerintah hingga berbasis Rukun Warga (RW).

Aman mengungkapkan, pemasaran digital saat ini adalah sebuah hal yang menjadi tuntutan zaman. Apalagi setelah mengalami masa pandemi Covid-19 yang memaksa sebagian orang untuk beralih dari hal-hal luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan (daring). "Harapan kami fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah mampu dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Kami pun akan terus melakukan penguatan-penguatan agar sektor ekonomi semakin baik," tandasnya, Kamis (2/6).

Selain memperbanyak wifi publik, dorongan juga dilakukan melalui berbagai pelatihan kepada masyarakat. Terutama yang menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah serta pengelola kampung-kampung wisata. Pelatihan untuk penguatan ekosistem digital berbasis wilayah tersebut sudah digelar sejak tahun lalu dan kini semakin digencarkan.

Aman menambahkan, program tersebut sesuai dengan semangat Gandeng Gendong yakni kerja sama yang baik antara Pemkot Yogya, korporasi, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. "Semoga dengan penyediaan wifi publik yang menjangkau masyarakat bisa menimbulkan dampak positif, produktif dan bahkan mempunyai nilai tambah ekonomis untuk warga masyarakat," imbuhnya.

Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kota Yogya Tri Haryanto ST MT, mengatakan saat ini ada 885 wifi publik yang terpasang di 502 RW se-Kota Yogya. Wifi publik yang terpasang tersebut dibiayai oleh APBD Kota Yogya dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari pihak swasta (korporasi). Pihaknya menargetkan tiap RW sedikitnya terpasang satu wifi publik.

Dalam setiap pemasangan wifi publik di wilayah, pihaknya turut memberikan pelatihan bagi pelaku usaha setempat yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama pada periode Mei hingga Juli dan tahap kedua periode Agustus hingga Oktober. (Dhi)-f

## KAWASAN KUMUH PERKOTAAN TERSISA 114,7 HA

# Yogya Dinilai Paling Berhasil Tata Sungai

**YOGYA (KR)** - Kota Yogya dinilai menjadi daerah yang paling berhasil dalam menata sungai. Terutama kaitannya dengan mengentaskan kawasan kumuh menjadi asri dan produktif.

Team Leader Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) DIY Mohammad Imam Santoso, mengungkapkan penataan kawasan kumuh di Kota Yogya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai. Hal ini karena mayoritas kawasan kumuh berada di kawasan bantaran sungai. "Penataan sungai yang dilakukan Yogya selama ini paling berhasil. Itu juga tidak lepas dari kemampuan Kota Yogya dalam melibatkan komunitas," tandasnya dalam koordinasi keberlanjutan program Kotaku serta pengenalan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (FPKP) Kota Yogya di Balaikota, belum lama ini.

Selain pelibatan komunitas, perencanaan yang dilakukan Kota Yogya tergolong sangat baik. Hal itu pula yang menjadikan Kota Yogya mampu meng-

gaet program pendanaan dari pusat yang lebih besar. Rata-rata tiap kelurahan mendapatkan alokasi Rp 2 miliar untuk menata lingkungan maupun sanitasi.

Terkait keberlanjutan program Kotaku yang fasilitasnya akan berakhir akhir tahun ini, Ketua FPKP Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya, mengaku siap menjadi mitra strategis agar penataan wilayah bisa terus berjalan. Dirinya yang menjabat Sekda Kota Yogya juga telah menyiapkan skema pendanaan supaya tidak semata mengandalkan APBD.

Aman mengungkapkan, penataan kawasan kumuh tidak semata menyentuh aspek teknis melainkan harus menyasar sosiologi masyarakat. Hal ini karena membangun permukiman yang nyaman berkaitan dengan membangun stabilitas masyarakat. "Bagaimana dalam konteks penataan itu bisa melibatkan masyarakat. Karena ketimpangan menjadi awal ketidakstabilan. Sehingga kami

akan memberikan ruang bagi aspek sosiologis agar penataan ini tidak sekadar membuat Yogya tertata namun juga indah, asri, nyaman dan berimplikasi pada kesejahteraan," urainya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, mengaku kawasan kumuh perkotaan di Kota Yogya saat ini tercatat 114,7 hektare (ha). Seluruhnya tersebar di 12 kecamatan, kecuali Kraton dan Pakualaman. Penuntasan luasan kawasan kumuh tersebut dibagi dalam tiga kewenangan. Masing-masing ialah pemerintah pusat menanganai 56 hektare, Pemda DIY 36,68 hektare, dan Pemkot 22,04 hektare.

Luasan kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab Kota Yogya, imbuh Agus, bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun. Akan tetapi dirinya berharap kolaborasi dan sinergi tetap terus bergulir meski pendampingan Kotaku akan selesai pada akhir tahun ini. (Dhi)-f

**HANYA 3 Hari** BELANJA MURAH 30% BISA DAPAT RUMAH 30% FURNITURE 30%  
PERIODE : 03-05 JUNI 2022

ABC 20% DISKON	INDOMILK 20% DISKON	BIORÉ 20% DISKON	PANTENE 30% DISKON
ABC 20% DISKON	INDOMILK 20% DISKON	BIORÉ 20% DISKON	PANTENE 30% DISKON
ABC 20% DISKON	INDOMILK 20% DISKON	BIORÉ 20% DISKON	PANTENE 30% DISKON

HARGA BELUM TERMASUK DISKON | SYARAT & KETENTUAN BERLAKU  
JL. JOGJA-SOLO KM. 7 BABARSARI YOGYAKARTA TELP. 0274 - 485288  
JL. G. SIMANJUNTAK 70 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 561254  
JL. MENTERI SUPENO NO. 38 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 386797  
JL. PALAGAN TENTARA PELAJAR NO. 31 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 869990  
JL. GODEAN KM. 2.8 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 565612  
JL. IMOGIRI TIMUR KM. 7, YOGYAKARTA TELP. 0274 - 4285579